

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ide awal topik penelitian ini berangkat dari besarnya minat penulis terhadap kajian mengenai fenomena perluasan peran korporasi multinasional (MNC) dalam hubungan internasional kontemporer. Dalam hubungan internasional kontemporer, peran MNCs tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. MNCs kini telah menjadi aktor penting yang sejajar dengan Negara, INGO, IGO, dan lainnya. Seperti ungkapan Dr. David C. Korten dalam bukunya *When Corporations Rule the World*, “dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini.”¹ Korporasi multinasional melakukan ekspansi usahanya, mendirikan cabang-cabang di negara lain di seluruh belahan dunia, terutama di negara dunia ketiga untuk dapat menerapkan prinsip efisiensi dalam produksinya. Dimana mereka dapat memperoleh tenaga kerja dan bahan baku murah, sehingga dapat mengeruk keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang luar biasa tersebut, tidak hanya menjadikannya berkuasa di bidang ekonomi dan perdagangan, namun juga merambah pada bidang politik. Seringkali suatu kebijakan politik dipengaruhi oleh campur tangan MNC.

Terlebih lagi korporasi multinasional dan perannya yang sedemikian hebat, juga telah merambah ke Indonesia. Berbagai korporasi multinasional dengan mudahnya menerapkan prinsip efisiensi produksi, yaitu dengan mencari tenaga kerja atau buruh dan juga bahan baku

¹ *CSR Untuk Masa Depan Bangsa dan Dunia* (diakses pada 10 Oktober 2010); diunduh dari http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=103%3Acsr-untuk-masa-depan-bangsa-dan-dunia-&option=com_content&Itemid=121

murah di Indonesia. Buruh-buruh tersebut adalah rakyat Indonesia, orang-orang di sekitar kita, teman kita, tetangga, atau bahkan saudara kita yang rela dibayar murah untuk keuntungan MNC. Sumber daya alam yang digunakan oleh MNC sebagai bahan baku juga merupakan kekayaan alam Indonesia yang dipergunakan MNC secara murah untuk keuntungan yang sangat besar. Sikap abai dan rela dari masyarakat terhadap eksploitasi MNC inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengambil topik penelitian ini.

Selain itu, alasan dari pemilihan judul ini adalah karena sejauh pengetahuan penulis, belum banyak tulisan yang membahas tentang keberhasilan MNC di negara dunia ketiga, atau lebih spesifiknya di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini.

Penulis menggunakan pemikiran hegemoni Antonio Gramsci sebagai landasan penelitian, karena menurut penulis, pemikiran hegemoni Antonio Gramsci memiliki keistimewaan dalam menjelaskan dominasi kapitalisme dalam masyarakat yang melengkapi pemikiran Karl Marx.

Alasan tersebut di atas lah yang menarik perhatian penulis untuk mengambil topik ini sebagai judul skripsi.

B. Latar Belakang Permasalahan:

Hubungan internasional dalam perspektif kontemporer bukan lagi dilihat sebagai hubungan melintas batas negara antara pemerintah negara satu dan yang lainnya seperti pada perspektif konvensional. Pada perspektif kontemporer, hubungan internasional telah berkembang dengan lebih banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Seperti yang diungkapkan Quincy Wright dalam buku *The Study of International Relations* menyatakan “... *varied types of groups nation states, governments, people, regions, alliances, confederations, international organizations, even*

*industrial organizations, cultural organizations, religious organizations.*² Dengan demikian, lebih tepatnya hubungan internasional dimaknai sebagai setiap hubungan yang melintas batas negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun non negara atau warga negara. Aktor-aktor non negara tersebut meliputi organisasi internasional non negara, LSM, individu dan korporasi atau perusahaan.

Korporasi multinasional (MNC), yaitu korporasi yang memiliki fasilitas dan aset-aset paling tidak di satu negara lain daripada negara asal atau *home country* korporasi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kantor atau pabrik di negara-negara lain dan biasanya memiliki kantor pusat tempat mereka mengkoordinasikan manajemen global,³ adalah aktor hubungan internasional yang sangat penting, terutama pada masa globalisasi seperti sekarang ini. Korporasi-korporasi besar yang berasal dari negara maju secara masiv mendirikan cabang-cabangnya serta menyebar hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di negara-negara berkembang sebagai multinational corporation (MNC), yaitu korporasi yang memiliki cabang usaha di beberapa negara lain, selain negara asal korporasi, dan transnational corporation (TNC), yaitu korporasi yang beroperasi di beberapa negara lain selain negara asal, tetapi tidak memiliki cabang usaha di negara-negara tempatnya beropersi tersebut.

Saat ini MNC dan TNC tersebut dapat dikatakan sangat berhasil. Korporasi besar dari negara-negara maju yang membuka cabang di negara-negara lain memperoleh keuntungan yang sangat pesat. Bagaimana tidak, korporasi-korporasi tersebut membuka cabang hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di negara-negara dunia ketiga dan negara berkembang. Di negara-

² Quincy Wright dikutip dalam "Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional", Sidik Jatmika (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001), hal 46

³ *Multinational Corporation-MNC* (diakses pada tanggal 8 Agustus 2010); diunduh dari <http://www.investopedia.com/terms/m/multinationalcorporation.asp>

negara dunia ketiga, sejak tahun 1970-an korporasi multinasional menerapkan prinsip efisiensi, yaitu prinsip penggunaan sumber-sumber dunia dengan efisiensi maksimal dan pemborosan minimal,⁴ untuk memperoleh keuntungan korporasi sebanyak-banyaknya. Selain dapat menerapkan prinsip efisiensi, ekspansi MNC ke negara dunia ketiga juga dilakukan untuk mengatasi masalah berbagai protes dan tuntutan kelompok buruh di negara-negara maju asal korporasi tersebut, terutama Amerika Serikat yang semakin membebani pihak perusahaan. Dengan demikian, korporasi memilih untuk melakukan ekspansi ke negara dunia ketiga, dimana mereka dapat memperoleh buruh murah dan tanpa adanya tindakan demonstrasi atau protes, bahan baku murah dan juga pasar yang strategis.

Selama dua dekade menjelang berakhirnya abad 20 perusahaan-perusahaan ini meningkat secara kuantitas dari 7000 MNC di tahun 1970 menjadi 37.000 di tahun 1990. Pada saat tersebut mereka menguasai 67% perdagangan dunia antar MNC dan menguasai 34,1% dari total perdagangan global. Kini sekitar 100 MNC yang mengontrol 75% perdagangan global. (Peter Marcus:2000).

Di negara dunia ketiga, MNC melakukan eksploitasi tenaga kerja lokal. Dengan dalih menekan biaya produksi dan tersedianya buruh dengan upah rendah, tentu ini menjadi komoditas MNC dalam melakukan ekspansi. Eksploitasi buruh dengan upah rendah namun MNC masih saja menjual produk dengan harga tinggi. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh MNC pun sangatlah besar.

Kekuatan ekonomi terbesar di dunia didominasi oleh 57 Negara dan 43 MNC. Asset General Motor (AS) dan Exxon (AS) lebih besar ketimbang Yugoslavia, Swiss maupun Arab

⁴ Maisonrouge, dikutip dalam "Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional", Richard J. Barnet & Ronald E. Muller (Jakarta: LP3ES, 1984), hal 3

Saudi. British Petroleum (Inggris) menghasilkan lebih dibanding apa yang didapat Bulgaria, atau Finlandia. Penjualan General Motor dapat melebihi GNP (*Gross National Product*) negara-negara di dunia, begitu juga penghasilan ITT melebihi pendapatan negara Portugal. Pada tahun 1997 total penjualan General Motors mencapai US\$ 164 milyar, sementara GDP Norwegia hanya sebesar US\$ 153 milyar, GDP Indonesia US\$ 52,2 milyar.⁵

Keadaan di Indonesia pun juga tidak jauh berbeda. MNC telah mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 1970-an. Korporasi internasional dapat memperoleh bahan baku dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Dalam berbagai kasus, malahan penduduk asli terkadang tidak menikmati sama sekali hasil SDA tersebut. Selain itu korporasi multinasional juga dapat merekrut tenaga kerja lokal yang mau dibayar murah. Para pekerja tersebut dituntut bekerja keras dengan jam kerja tidak menguntungkan serta kesejahteraan hidup mereka kurang diperhatikan.

Sebagai contoh adalah para buruh di perusahaan yang memproduksi produk GAP, dalam pabrik perusahaan ini, lebih dari 1000 buruh, sebagian besar adalah pekerja wanita, bekerja pada ruangan penuh sesak di bawah lampu bersuhu 40°C. jam kerja mereka bervariasi, bahkan jika ada permintaan ekspor, mereka bisa saja diberikan jam kerja 24 jam. Kadang mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 12 malam dengan keadaan berdiri selama jam kerja tersebut. Di sisi lain hal yang sangat mengejutkan adalah, produk yang mereka buat, salah satunya pakaian olah raga bermerk GAP, dibandrol harga 112 ribu, dan dari jumlah tersebut, buruh pabrik hanya mendapat bagian 500 rupiah saja. Untuk sepatu Nike seharga 1,4 juta rupiah, buruh yang memproduksi sepatu tersebut hanya memperoleh 5 ribu rupiah saja. Dan contoh yang lebih mengejutkan adalah,

⁵ Panduan Globalisasi (Diakses pada 12 Oktober 2010); diunduh dari:
<http://www.google.co.id/url?q=http://lodzi.hady.googlepages.com/PanduanGlobalisasi1.rtf&sa=U&ei=UvxZTeGsHM6HrAfZ5L2bDA&ved=0CAoQFjAA&usg=AFQjCNFnmN64TLInypxUKZ9o8Gegn9Xw>

untuk mempromosikan sepatu Nike, pegolf Tiger Wood mendapatkan honor yang lebih besar daripada gaji seluruh buruh di perusahaan yang memproduksi sepatu tersebut di Indonesia.⁶

Setelah mendapatkan bahan baku produksi dan tenaga kerja murah, korporasi multinasional tersebut juga melemparkan produknya di negara yang bersangkutan. Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar merupakan pasar yang strategis bagi produk-produk MNC. Seperti halnya Indonesia, dengan wilayah yang membentang dari pulau Sumatra hingga Irian Jaya, negara ini memiliki 237,556,363 penduduk,⁷ yang merupakan pasar yang sangat strategis bagi pelepasan produk-produk MNC. Dengan antusiasme yang tinggi, masyarakat di suatu negara dengan senang hati menjadi konsumen setia dari produk-produk perusahaan multinasional, padahal MNC mengambil keuntungan yang lebih besar daripada produk lokal, serta keuntungan tersebut akan dibawa kembali ke negara asalnya. Dengan situasi seperti ini, tidak dielakkan lagi keuntungan yang diperoleh MNC pun sangatlah besar. Sebagai contoh, keuntungan total dari perusahaan GAP mencapai 38 milyar dolar pada tahun 2001.⁸ Namun demikian, masyarakat di negara host, dalam hal ini difokuskan pada negara Indonesia, dengan sukarela membiarkan dirinya dieksploitasi baik dari segi sumber daya alam, tenaga kerja murah dan pasar. Masyarakat tersebut dengan eksploitasi yang dilakukan terhadapnya tidak melakukan perlawanan.

Dalam melihat keadaan tersebut, penulis tertarik pada pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Gramsci adalah tokoh yang memiliki keistimewaan pemikiran dalam sejarah teori Marxis. Keistimewaan dari pemikiran Gramsci adalah dia melengkapi pemikiran Marxis, sementara Karl Marx dan Friedrich Engels memberikan analisis menyeluruh tentang kapital di

⁶ John Pilger, *The New Rules of The World* (London: Oasis Filevision, 2002) 1 videocassette (54 min)

⁷ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971-2010 (diakses pada 15 Desember 2010), diunduh dari: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1

⁸ Op. cit

tingkat sosial dan ekonomi, khususnya menunjukkan bagaimana kapital mengantagoniskan kelas pekerja dan menyebabkan krisis, serta kemungkinan terjadinya revolusi, Gramsci melengkapi ini dengan suatu teori canggih tentang ranah politik dan bagaimana itu secara organik/dialektik berhubungan dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi.⁹

Gramsci hidup pada masa pemerintahan Benito Mussolini dengan rezim Fasisme di Italia yang eksploitatif terhadap rakyatnya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran Marx, Gramsci mencoba menggerakkan rakyat Italia untuk melakukan revolusi melawan rezim fasis Mussolini yang eksploitatif seperti revolusi di Rusia yang dipimpin oleh Lenin. Namun demikian, kesadaran revolusi dari masyarakat Italia sangat rendah dan mereka menerima ketertindasannya dengan suka rela. Kegagalan revolusi yang dipimpin oleh Gramsci tersebut akhirnya mengantarkannya ke penjara sampai seumur hidupnya. Pada masa penahanannya tersebut Gramsci menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang kapitalisme yang melengkapi pemikiran Marx.

Kondisi eksploitatif di Italia oleh rezim Mussolini pada masa Gramsci tersebut serupa sekali dengan keadaan dominasi MNC di Indonesia, dimana masyarakat Indonesia tidak menyadari akan eksploitasi yang mereka terima, malahan masyarakat tersebut mendukung dengan sukarela hal-hal yang akan memberikan keuntungan terhadap MNC, yang kemudian mengantarkan MNC menuju keberhasilan dalam melakukan ekspansinya di negara-negara dunia ketiga. Penulis berpikir bahwa penelitian ini akan dapat menjelaskan kondisi MNC dan masyarakat di Indonesia dengan menggunakan pemikiran Hegemoni, Antonio Gramsci.

⁹ Trent Brown, Gramsci dan Hegemoni (diakses pada 10 Oktober 2010); diunduh dari <http://links.org.au/node/1351>

Dengan hasil pemikiran yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci tentang hegemoni, pada rencana penulisan ini penulis akan mencoba meneliti keterkaitan antara teori hegemoni dengan keberhasilan korporasi multinasional di Indonesia yang menjadi kelompok dominan serta menguasai masyarakat sehingga dapat memperoleh kepentingan mereka, yaitu kesuksesan MNC dalam melakukan ekspansinya.

Teori hegemoni yang dirumuskan Gramsci dari situasi negara pada masanya, dimana rakyat secara suka rela dikuasai oleh rezim Musolini sebagai kelompok dominan, akan dicoba diterapkan untuk meneliti keberhasilan korporasi multinasional dalam menguasai masyarakat Indonesia. Memang dalam pemikiran yang diungkapkannya, Gramsci terlihat seperti merujuk hegemoni sebagai upaya dominasi ideologi yang dilakukan oleh negara pada masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan mereka ataupun upaya yang dilakukan oleh partai untuk mengorganisir kepentingan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran politik dan kesadaran revolusi pada penguasa yang melakukan penindasan, namun demikian penulis akan mencoba menerapkan pemikiran hegemoni pada hubungan antara masyarakat dengan korporasi multinasional, dimana korporasi multinasional dalam hal ini menduduki posisi dominan atau super-struktur. Hal tersebut juga berdasarkan pada hasil pemikiran Gramsci, yaitu bahwa super-struktur dibagi menjadi dua, yaitu ‘masyarakat politik’ yang berupa birokrasi pemerintahan maupun negara dan ‘masyarakat sipil’.¹⁰ Sejalan dengan pemikiran Gramsci tersebut, penulis berpendapat bahwa kelompok dominan yang berkuasa tidak harus selalu merupakan pemerintah di negara tertentu, tetapi juga aktor-aktor lain, termasuk korporasi, sebab korporasi merupakan salah satu unsur atau bagian dari masyarakat sipil yang sangat kompleks.

¹⁰ Nezar Patria & Andi Arief “Antonio Gramsci Negara & Hegemoni” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hal 13

C. Pokok Permasalahan:

Dari pembahasan yang dikemukakan, maka yang ingin diangkat dalam skripsi ini sebagai pokok permasalahan adalah, “bagaimana korporasi multinasional berhasil melancarkan ekspansinya di Indonesia tanpa mendapatkan perlawanan yang cukup berarti dari masyarakat yang dieksploitasinya”.

D. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan:

Konsep Hegemoni

Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.¹¹ Dalam hal ini tercermin bahwa ideologi sangat berpengaruh pada upaya dominasi suatu kelas terhadap kelas tertentu. Dalam *Selections from the Prison Notebooks* dikatakan, “... and this presupposes the attainment of a “cultural-social” unity through which a multiplicity of dispersed wills, with heterogeneous aims, are welded together with a single aim, on the basis of an equal and common conception of the world..”¹² Dengan demikian, untuk mempertahankan kekuasaan, kelas dominan harus membuat kesatuan sosial budaya di mana berbagai keinginan dengan tujuan yang berbeda-beda dapat dijalin menjadi tujuan tunggal, yang menjadi dasar bagi konsepsi umum mengenai dunia.

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.

¹¹ Roger Simon, “Gagasan-gagasan Politik Gramsci”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hal 22

¹² Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, ed., *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publishers, 1992), hal 349

Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.¹³

Pemikiran Hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci merupakan suatu kritik sekaligus melengkapi pemikiran Marx. Pandangan Marx yang pengaruhnya cukup luas merupakan hasil dari pandangan filsafatnya tentang masyarakat dan sejarah yang dikenal dengan materialism historis. Inti pandangan ini adalah bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Dengan demikian bidang ekonomi merupakan basis (*basic-structure*), sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, yaitu institusi-institusi sosial, terutama negara dan bentuk-bentuk kesadaran merupakan bangunan atas (*super-structure*). Menurut Marx, ciri yang sangat menentukan semua bentuk ekonomi adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja. Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu sama lain berdasarkan posisi dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Secara garis besar, pada pola masyarakat kapitalis, kelas-kelas sosial terdiri dari dua kelompok kelas, yaitu kelas pemilik (*borjuis*) dan kelas buruh (*proletar*). Kelas pertama hidup dari hasil penghisapan terhadap kelas kedua. Kelas buruh yang cuma memiliki tenaga kerjanya sangat tergantung pada kelas pemilik yang mengendalikan kerja mereka. jadi ciri masyarakat kapitalis adalah bahwa mereka dibagi ke dalam kelas-kelas atas dan bawah dan struktur ekonominya tersusun sedemikian rupa sehingga yang pertama dapat hidup dari penghisapan tenaga kerja kelas yang kedua.

Menurut Marx, dalam masyarakat kapitalis, basis struktur sangat menentukan bangunan atasnya, yaitu super struktur. Basis struktur menurut Marx adalah faktor produksi dan

¹³ Op. cit hal 19

superstruktur adalah negara dan bentuk kesadaran sosial, seperti pandangan moral, filsafat, hukum, agama, estetika dan sebagainya. Bangunan atas atau super struktur adalah cermin dari keadaan keadaan struktur bawah. Negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yaitu kelas borjuis, yang fungsinya secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas atas. Sedangkan ideologis atau bentuk kesadaran sosial seperti agama, filsafat, moral dan sebagainya berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu.¹⁴ Pendekatan ini disebut juga sebagai determinisme ekonomis, dan dikenal sebagai pandangan Marxisme klasik yang intinya “bukan kesadaran yang menentukan eksistensi sosial, tapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran,”¹⁵ yaitu bahwa kesadaran manusia yang membimbing dan menentukan hubungan individual itu adalah produk dari kondisi material cara suatu benda diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi.

Negara merupakan ekspresi politik dari kelas dominan. Menurut Engels, negara memiliki asal-usulnya untuk mengontrol perjuangan sosial antar kepentingan ekonomi yang berbeda, dan bahwa kontrol itu dipegang oleh kelas dominan, kelas yang mempunyai kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Marx juga berpendapat bahwa negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis. Munculnya negara sebagai kekuatan represif untuk menjaga pertentangan kelas. Selain fungsinya yang represif dan sebagai pelayan bagi kelas dominan untuk menjaga pertentangan kelas dan mencegah kelas tereksplotasi untuk melawan kelas borjuis.

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal 259

¹⁵ Sindhunata dikutip dalam “Antonio Gramsci Negara & Hegemoni” Nezar Patria & Andi Arif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal 4

Pandangan Marx tersebut disetujui oleh Lenin, seorang penafsir Marx Rusia. Lenin menyimpulkan bahwa negara adalah alat pengatur kelas. Menurut Lenin

Negara adalah hasil dari perwujudan dari tidak terdamaikannya pertentangan kelas. Negara muncul ketika, di mana dan pada tingkatan itu secara obyektif pertentangan kelas tak dapat didamaikan. (Lenin, 1918;12)

Lenin menganggap bahwa jalan untuk menyelesaikan pertentangan kelas itu adalah dengan revolusi. Bila pertentangan kelas selesai, maka negara akan turut melenyap. Lenin berhasil menggerakkan masyarakat Rusia untuk menggulingkan pemerintahan Tsar yang eksploitatif melalui revolusi Bolshevicks pada tahun 1917. Lenin berharap bahwa seperti keberhasilan revolusi Bolshevicks, akan menyusul revolusi yang sama di negara-negara Eropa lainnya. Namun demikian harapan Lenin tersebut tidak terjadi. Di negara-negara Eropa Barat yang kapitalismenya sudah matang dan tertata rapi, masyarakat tidak tergerak untuk melakukan revolusi.

Dalam pandangan Gramsci negara tidak lagi dilihat sebagai alat kekuatan dari sebuah kelas (seperti yang dikembangkan oleh Marx, Engels dan Lenin), tetapi sebagai semua jenis kegiatan dalam seluruh jangkauan tempat di mana hubungan produksi sosial mampu direproduksi.¹⁶

Menurut Gramsci, hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari dominasi ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama intelektual.

¹⁶ Sassoon dikutip dalam "Antonio Gramsci Negara & Hegemoni" Nezar Patria & Andi Arif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal 12

Latar belakang politik gagasan hegemoni tersebut adalah pengalaman Gramsci yang muncul dari situasi politik ketika ia hidup dan menjadi pemimpin intelektual dari gerakan massa proletar di Turin selama masa perang dunia pertama dan masa sesudah itu. Italia menjelang perang usai merupakan suatu pertarungan politik partai, baik kiri maupun kanan, yang akhirnya memberikan kemenangan pada fasisme pada 1922 dan melenyapkan hak-hak politik. Sebagai anggota kunci dari Partai Sosialis Italia dan kemudian Partai Komunis Italia (PCI), Gramsci melihat kegagalan gerakan massa buruh revolusioner dan bangkitnya fasisme reaksioner didukung oleh banyak massa kelas pekerja.

Dari pengalaman tersebut, Gramsci merumuskan pandangan alternatif Marxis terhadap negara, yaitu “suatu kesatuan kompleks dari kegiatan teori dan praktek, yang dengannya kelas berkuasa tak cuma membenarkan dan memelihara dominasinya, tapi mengatur untuk memenangkan konsensus aktif dari yang diatur”¹⁷

Menurut Gramsci, organisasi-organisasi yang terdapat dalam masyarakat sipil mempunyai berbagai tujuan yang berbeda-beda, diantaranya politik, ekonomi, seni, olah raga, dan sebagainya. yang sama adalah semua organisasi itu mengejawantahkan praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, meskipun tanpa disadari. Kelas yang berkuasa membangun hegemoninya dengan menyatukan nilai-nilai dan asumsi-asumsi dari kelas-kelas lain dalam masyarakat dengan kepentingan kelas mereka sendiri, sehingga mereka bisa membangun pondasi sosial dalam masyarakat. Gramsci berpendapat bahwa hegemoni mencakup persetujuan spontan dari sebagian besar masyarakat

¹⁷Quintin Hoare dan Nowell Smith, ed., *Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publisher, 1992), hal 244

tujuan umum dari kehidupan sosial yang ditetapkan oleh kelas dominan.¹⁸ Dengan demikian, jika suatu kelas ingin mencapai posisi hegemoni, mereka harus mencari cara-cara yang bisa digunakan untuk menyalurkan persetujuan spontan ini. Hal ini bisa dilakukan melalui aktifitas politik.

Pemikiran Gramsci berakar pada Marx dan Lenin tentang asal-usul material dari kelas dan peranan perjuangan kelas dan kesadaran dalam perubahan sosial. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kapitalisme masih bertahan sementara Gramsci berkeyakinan bahwa prakondisi sosial untuk transisi kepada sosialisme sudah ada. Menurutnya keberlanjutan kapitalisme disebabkan saling keterkaitan antara basis dan superstruktur dalam menentukan perubahan sosial. Untuk itulah, dia membagi super-struktur menjadi dua tingkatan. Bila menurut Marx super-struktur adalah institusi negara dan nilai kesadaran, maka menurut Gramsci super-struktur adalah masyarakat sipil dan masyarakat politik atau negara.

Kedua fungsi ini berhubungan. Perangkat institusi pertama memperoleh persetujuan spontan dari massa rakyat terhadap arahan umum yang dipaksakan pada kehidupan sosial oleh kelompok fundamental yang dominan. Persetujuan ini mempunyai sumber sejarah yang dimiliki kelompok dominan berkat posisi dan fungsinya dalam dunia produksi. Sedangkan negara adalah alat-alat kekuasaan yang memaksa secara legal disiplin ketika persetujuan tidak didapatkan. Jadi hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya.¹⁹ Dengan demikian, kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum ini, yaitu dominasi budaya borjuasi membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, jalan pembebasan

¹⁸ Ibid, hal 12

¹⁹ Bellamy dikutip dalam "Antonio Gramsci Negara & Hegemoni" Nezar Patria & Andi Arif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal 14

dari kondisi ini adalah massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara yang menindas itu bisa terjadi. Hegemoni sebagai superstruktur mempunyai pengaruh dalam masyarakat sipil dalam melakukan perubahan sosial yang radikal.

Kapitalisme dipandang sebagai perkembangan yang niscaya menuju krisis dan kehancuran ekonomi karena pertentangan antara berbagai kekuatan dan hubungan produksi menjadi semakin besar. Namun demikian, pada kenyataannya kapitalisme tetap berkembang dan tumbuh subur.

Yang perlu ditekankan pada konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Untuk memahami apa yang coba dicapai oleh Gramsci ketika mengembangkan teori hegemoninya, kita dapat melihat konteks historis yang ia hadapi maupun perdebatan dalam pergerakan di masa itu.

Menurut Gramsci hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.²⁰ Dalam catatan prison notebooks Gramsci yang dikutip dalam “Gramsci’s Political Thought”, Roger Simon, Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual:

²⁰ Ibid, hal 19

Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap memimpin. (SPN 57-68)

Gramsci merubah makna hegemoni yang pada awalnya dipakai oleh Lenin sebagai sebuah strategi menjadi sebuah konsep. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Sedangkan kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.²¹

Namun demikian, Gramsci selalu berpendirian teguh bahwa hegemoni bukan semata-mata fenomena ideologis. Tidak akan ada hegemoni tanpa inti pokok ekonomi. Di lain pihak, jangan terjebak pada ekonomisme mekanisme lama dan yakin bahwa, meskipun hanya bisa menguasai ekonomi, dapat mengatur kehidupan lainnya. Watak kekuasaan dalam dunia modern adalah bahwa ia juga dibangun dalam hubungannya dengan persoalan politik, moral, intelektual, budaya, ideologi dan gender.²²

Hegemoni mencakup berbagai konsepsi mengenai bagaimana kekuatan dan gerakan sosial, dalam keberagamannya dapat diartikulasikan ke dalam suatu aliansi strategis. Untuk membangun sebuah tatanan budaya baru, bukan dengan cara menggambarkan kehendak kolektif yang sudah terbentuk, tetapi dengan menyempurnakan tatanan baru, membuat proyek sejarah baru.

²¹ Ibid hal 22

²² Ibid, hal 185

Menurut Gramsci, keengganan masyarakat tertindas dan kegagalan revolusi terjadi karena pihak yang tereksplorasi tersebut tidak mencari secara aktif dan menyelesaikan berbagai perbedaan dari kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakatnya. Mereka tidak tahu bahwa sudah menjadi karakter pokok peradaban kapitalis modern untuk mengembangkan pusat-pusat kekuasaan, sehingga semakin menyeret wilayah kehidupan ke dalam pertentangan sosial. Mereka tidak menyadari bahwa identitas yang terdapat pada diri manusia (subyektifitas mereka), kehidupan budaya mereka, kehidupan seksual mereka, kehidupan keluarga mereka, identitas suku mereka, kesehatan mereka secara luas telah terpolitisasikan.²³

Dalam konteks latar belakang politik Fasisme di Italia pada masa Gramsci, Fasisme mendapat dukungan luas dari kaum borjuis kota dan desa karena rezim Fasis Mussolini berhasil mengorganisir semua kekuatan borjuis ke dalam organisme politik tunggal yang terdiri dari partai politik, pemerintah dan negara, dan diperkuat dengan ideologi reaksioner yang berdasar pada nasionalisme agresif. Gerakan kelas pekerja berhasil dilumpuhkan, bukan hanya melalui penindasan dan kekerasan dan karena kepasifan pemimpin reformis, tetapi juga berkat kemampuan kaum kapitalis untuk mengorganisir kembali kekuatannya dengan cara baru, meskipun negara berada dalam situasi krisis ekonomi yang parah.

Menurut Gramsci, ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya, tetapi harus dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah dan dalam perannya sebagai pondasi atau agen proses penyatuan sosial.²⁴ Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan

²³ Ibid, hal 186

²⁴ Ibid, hal 87

dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif.

Kehendak umum hanya dapat dibangun melalui proses reformasi intelektual dan moral yang akan menciptakan konsepsi umum akan dunia. Harus ada kesatuan sosial-budaya di mana berbagai keinginan dengan tujuan yang berbeda-beda dapat dijalin menjadi tujuan tunggal yang menjadi dasar bagi konsepsi umum mengenai dunia.²⁵

Dengan demikian, sebuah kelas yang ingin bergerak maju menjadi hegemonik perlu membangun sistem ideologi yang dapat bertindak sebagai pondasi yang bisa mengikat dan menyatukan berbagai kelompok kekuatan sosial. Ideologi tersebut harus dibangun melalui perjuangan politik dan ekonomi, dan karakternya akan bergantung pada hubungan berbagai kekuatan yang ada. Hal ini merupakan salah satu aspek dari strategi revolusioner yang oleh Gramsci disebut perang posisi (*war of position*).

Pemikiran awam adalah salah satu bagian dari konsep hegemoni yang dikemukakan Antonio Gramsci. Istilah pemikiran awam digunakan untuk menunjukkan cara orang awam yang tidak kritis dan tidak sadar dalam memahami dunia. Dia mengatakan bahwa “semua manusia adalah filosof”²⁶ karena semua laki-laki dan perempuan mempunyai konsepsi tentang dunia serta seperangkat gagasan yang memungkinkan mereka memahami kehidupan mereka. Namun, cara mereka mempersepsi dunia seringkali rancu dan bertentangan, karena pemikiran mereka berasal dari berbagai sumber dan dari kejadian masa lalu, yang cenderung membuat mereka menerima ketidakadilan dan penindasan sebagai hal alamiah dan tidak bisa diubah. Namun demikian,

²⁵ Quintin Hoare dan Nowell Smith, ed., *Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publisher, 1992), hal 349

²⁶ *Ibid* hal 27

pemikiran awam tidak harus dilihat dalam pengertian negatif saja. Pemikiran awam merupakan tempat dibangunnya ideologi, juga menjadi tempat perlawanan terhadap ideologi. Dengan demikian, menurut Gramsci, tugas Marxisme adalah melakukan kritik pemikiran awam melalui proses interaksi mengembangkan inti positifnya menjadi pemikiran awam sosialis yang baru dan runtut.

Unsur selanjutnya dari konsep hegemoni Gramsci adalah blok historis. Blok historis adalah cara yang dilakukan kelas hegemonik dalam memadukan kepemimpinan dari suatu kelompok kekuatan sosial dalam masyarakat sipil dengan kepemimpinan dalam bidang produksi.²⁷ Dengan demikian, kelas hegemonik tidak cukup hanya menjadi kelompok dominan dalam bidang politik, namun mereka juga harus meraih kepemimpinan di bidang produksi. Hal ini karena kaum borjuis melakukan kontrol yang ketat atas proses produksi, sehingga mereka pun dapat juga menjadi kelas hegemoni dalam masyarakat sipil dan meraih kekuasaan negara. Hubungan sosial masyarakat sipil berkaitan erat dengan hubungan produksi.

Keadaan seperti tersebut di atas juga tengah terjadi di Indonesia. Dalam hal ini kelompok dominan atau kelas hegemonik bukan dilihat sebagai pemerintah di negara, melainkan korporasi asing yang ada di Indonesia. MNCs secara aktif menjual visinya, serta meyakinkan masyarakat Indonesia, yaitu para pekerja dan pasar atau konsumen untuk menghasilkan persetujuan atau konsensus dengan ide yang ditawarkan oleh korporasi internasional. Selain itu korporasi multinasional juga berusaha untuk mengetahui keadaan sosial budaya asli dari masyarakat Indonesia, untuk kemudian menciptakan suatu keadaan sosial budaya baru yang diterapkan pada seluruh masyarakat yang pada mulanya memiliki latar belakang sosial budaya yang beragam

²⁷ Roger Simon, *Gramsci's Political Thought*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hal 29

untuk dipersatukan dalam sebuah keadaan sosial budaya baru yang diciptakan oleh korporasi multinasional untuk kepentingan bisnis itu sendiri.

Mulai abad ke-20 kapitalisme memperluas sayapnya secara massif bentuk konsensus ini, terutama melalui kontrol korporasi dalam media dan periklanan. Di Amerika Serikat khususnya, penggalakkan American dream, dan semua komoditas tak bermanfaat yang dibutuhkan untuk meraihnya, tidak hanya berguna untuk menggenjot konsumsi dan sekaligus menguntungkan kepentingan ekonomi kaum kapitalis, ia juga menjual suatu gaya hidup yang hanya dapat diberikan oleh kapitalisme.²⁸ Kelas kapitalis menentang tiap kebijakan yang berupaya menyaingi media milik korporasi dengan menggunakan kekuatan politik hegemoniknya untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan konsensus lebih jauh, yang kemudian akan memperluas kepentingan mereka. Kelompok hegemonik akan terus berjuang dengan cara-cara ini untuk mencapai tingkat konsensus yang lebih besar, dalam kasus ini dengan mengunci rakyat ke dalam cara berpikir yang kaku dan menggilas tiap optimisme.

MNC di Indonesia juga berhasil mempengaruhi cara berpikir rakyat, serta menawarkan ide-ide gaya hidup melalui berbagai media. Gaya hidup yang diperkenalkan oleh korporasi tersebut hanya dapat dipenuhi oleh produk-produk MNC yang bersangkutan, serta menuntut masyarakat yang cara berpikirnya telah terpengaruh dengan ide yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang menguntungkan MNC, seperti menjadi konsumen atau pasar strategis bagi produk-produk MNC.

²⁸ Trent Brown, Gramsci dan Hegemoni (diakses pada 10 Oktober 2010); diunduh dari <http://links.org.au/node/1351>

- Tahapan Menjadi Hegemonik

Gramsci kemudian berlanjut menyatakan bahwa terdapat tiga tingkat perkembangan politik yang harus dilalui suatu kelompok sosial agar dapat mengembangkan gerakan yang dapat memulai perubahan.²⁹

Tahapan pertama disebut korporat-ekonomis. Seorang korporatis adalah individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Seseorang berafiliasi dengan tahap korporat-ekonomis sebagai fungsi dari kepentingan pribadinya, menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan orang lain untuk memperoleh keamanan mereka sendiri.³⁰ Serikat-buruhisme merupakan contoh dalam tahapan ini. Orang-orang bergabung dengan serikat buruh karena takut gajinya dipotong, penyusutan. Dapat dikatakan bahwa motifasi utamanya masih berkisar pada bidang ekonomi dan kepentingan pribadi. Dalam istilah ini, kita juga dapat memasukkan kerjasama jangka-pendek antara kapitalis-kapitalis yang sesungguhnya saling berkompetisi satu sama lainnya. Hal yang ditekankan adalah: pada tahap perkembangan historik ini, kelompok yang bersangkutan belum memiliki rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya.

Sebagai analogi, dapat digambarkan bahwa dalam tahapan ini terjadi ketika seorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain, seorang pengusaha dengan pengusaha lain dan sebagainya. Namun pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok profesional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu, namun mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain ke dalam kelas yang sama.

²⁹ Trent Brown, "Gramsci dan Hegemoni" (diakses 10 Oktober 2010), diunduh dari <http://links.org.au/node/1351>

³⁰ ibid

Tahap kedua, terjadi ketika anggota-anggota kelompok mulai menyadari bahwa terdapat wilayah kepentingan yang lebih luas dan bahwa terdapat orang lain yang berbagi kepentingan dengan mereka dan akan terus membagi kepentingan-kepentingan ini dalam masa depan yang terjangkau.³¹ Dalam tahap inilah rasa solidaritas berkembang, tapi solidaritas ini masihlah hanya berbasiskan kepentingan ekonomi bersama. Tidak terdapat pandangan dunia bersama atau apa pun semacam itu. Suatu kelas hanya bisa menjadi kelas hegemonik dengan memperhatikan berbagai kepentingan dari kelas dan kekuatan sosial yang lain serta menemukan cara untuk mempertemukannya dengan kepentingan mereka sendiri.³² Kepentingan ini tidak boleh sebatas pada perjuangan lokal atau menurut Gramsci disebut ekonomi-korporasi, dan mereka harus siap membuat berbagai konsensus agar bisa mewakili semua kelompok kekuatan sosial yang luas.

Dengan demikian, hubungan antara dua kelas utama yaitu pemodal dan buruh bukan merupakan hubungan pertentangan yang sederhana antara dua kelas, melainkan hubungan yang kompleks yang melibatkan kelas-kelas dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Masing-masing pihak berusaha keras memperkuat aliansinya sendiri, memecahbelah aliansi kelompok lain dan mengubah perimbangan kekuatan demi kepentingan kelompoknya. Solidaritas seperti ini dapat mengarah pada upaya-upaya untuk menggalakkan reformasi-reformasi di bidang hukum untuk memperbaiki posisi kelompok tersebut dalam sistem yang ada, tapi belum ada kesadaran tentang bagaimana mereka, dan yang lainnya, dapat diuntungkan oleh pembentukan sistem yang baru. Pada fase ini telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas, namun masih di bidang ekonomi.

³¹ *ibid*

³² Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hal 23

Tahapan ketiga, adalah tahapan hegemoni yang dicapai dengan tahapan nasional-kerakyatan. Dalam tahapan ini suatu kelas melampaui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi. Dalam tahapan ini, kelas sudah memikirkan suatu gerakan atau perjuangan politik.³³ Hanya dengan melewati tahap ketiga maka hegemoni dapat benar-benar menjadi mungkin. Dalam tahap ini, anggota-anggota kelompok sosial mulai menyadari kepentingan dan kebutuhan untuk menjangkau melampaui apa yang dapat mereka lakukan dalam konteks kelas-kelas mereka tersendiri. Ini adalah fase di mana ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah-pecah, sekarang bersaing sampai salah satunya atau gabungan dari ideologi-ideologi itu menang sehingga bisa menyatukan tujuan-tujuan ekonomi, politik, intelektual dan moral, sehingga terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kuat terhadap kelompok lain yang lebih rendah.

Dalam fase nasional kerakyatan ini, suatu kelompok harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Misalnya adalah perjuangan radikal rakyat bagi kebebasan sipil, gerakan perempuan, gerakan perdamaian dan berbagai gerakan yang mengungkapkan tuntutan dari minoritas etnik, dari kaum muda atau pelajar. Gerakan-gerakan tersebut bukan semata-mata sebagai perjuangan kelas sekalipun mempunyai kaitan dengannya.³⁴ Jadi, hegemoni mempunyai dimensi nasional kerakyatan, di samping dimensi kelas. Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat, seperti yang dikatakan Gramsci, “Dalam Konsep Hegemoni lah berbagai kepentingan yang bersifat

³³ Ibid, hal 35

³⁴ Ibid, hal 24

nasional dipadukan”.³⁵ Kelas hegemoni adalah kelas yang menggabungkan perjuangan dan gagasan kelas lain dengan kepentingan kelas mereka untuk meraih kepemimpinan nasional.

Menjadi hegemonik tidak dapat direduksi sebagai perjuangan kelas semata, meskipun gerakannya berkaitan erat dengan perjuangan kelas. Selain yang telah disebutkan di atas, gerakan lain yang tidak harus mempunyai karakter kelas adalah, gerakan perempuan, gerakan mahasiswa, mahasiswa, minoritas etnis, pemuda, gerakan anti nuklir, gerakan ekologi, aktifitas yang memperhatikan masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya.

Dalam formulasi yang kompleks ini, beragam ideologi kelompok-kelompok yang beraliansi akan berkumpul. Tak dielakkan lagi akan terjadi konflik antara ideologi-ideologi ini, dan melalui proses perdebatan dan pertarungan, satu ideologi, atau kombinasi penyatuan darinya, akan muncul mewakili kelas-kelas yang beraliansi. Ideologi ini dapat dikatakan hegemonik, kelompok yang mewakilinya telah meraih posisi hegemonik atas kelompok-kelompok yang ter subordinasi. Dalam tahap ini, kelas mencapai kedewasaan dengan meraih kesatuan antara tujuan ekonomi dan politik maupun kesatuan moral dan intelektual atau dapat dikatakan sebagai saling berbagi suatu pandangan dunia.

Dengan persatuan ini, kelas hegemonik mentransformasi masyarakat untuk meletakkan persyaratan bagi ekspansi kelompok hegemonik. Negara menjadi mekanisme untuk melakukan ini: kebijakan dihasilkan dan ditegakkan untuk memungkinkan kelompok hegemonik mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan menciptakan kesesuaian antara tujuannya dan tujuan kelompok-kelompok lainnya. Meskipun tujuan-tujuan ini diformulasikan dengan pemikiran untuk memajukan kepentingan satu kelompok, walau demikian tujuan-tujuan tersebut harus

³⁵ Quintin Hoare dan Nowell Smith, ed., *Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publisher, 1992), hal 241

dialami oleh penduduk sebagai kepentingan semua orang. Agar ini berjalan efektif, kelompok hegemonik harus memiliki suatu bentuk tertentu dalam menangani kepentingan kelas-kelas yang ter subordinasi. Kepentingan yang dominan tidak dapat dengan begitu saja diterapkan kepada mereka.

- Intelektual

Intelektual organik merupakan unsur yang penting dalam pemikiran hegemoni Antonio Gramsci. Yang perlu ditekankan dalam konsep intelektual adalah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, watak kekuasaan yang lahir dari sesuatu yang mirip monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa dan perlunya perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam transisi menuju sosialisme. Gramsci menolak pandangan tradisional yang menyatakan bahwa intelektual hanya terdiri dari ahli sastra, filosof dan seniman. Intelektual bukan dicirikan oleh aktifitas berpikir intrinsik yang dimiliki oleh semua orang, namun oleh fungsi yang mereka jalankan. *All men are intellectuals, one could therefore say: but not all men have in society the function of intellectuals.*³⁶ Dengan demikian, Gramsci berpendapat bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual.

Gramsci memperluas definisi kaum intelektual, yaitu semua orang yang berfungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Intelektual bukan hanya pemikir, penulis dan seniman, namun juga organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik, dan mereka tidak hanya berguna dalam masyarakat sipil dan negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi. Kemudian Gramsci membagi intelektual menjadi dua, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik.

“...Every social group, coming into existence on the original terrain of an essential function in the world of economic production, creates together with itself, organically, one or

³⁶ Quintin Hoare dan Nowell Smith, ed., *Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (New York: International Publisher, 1992), hal 9

more strata of intellectuals which give it homogeneity and awareness of its own function not only in the economic but also in the social and political fields."³⁷ Gramsci berpendirian bahwa setiap kelas yang mempunyai kedudukan penting menciptakan satu atau lebih strata kaum intelektual yang sadar akan perannya bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam lapangan politik dan sosial. Intelektual tidak membentuk sebuah kelas, namun setiap kelas mempunyai intelektualnya sendiri. Sebagai contoh, kaum kapitalis menciptakan manajer industri dan teknisi, ekonom, pegawai negeri, dan organisator kebudayaan baru dari suatu sistem hukum baru. Gramsci menyebutnya intelektual organik, sebagai kelompok yang berbeda dari intelektual tradisional.

intelektual organik, menurut Gramsci adalah intelektual yang langsung berhubungan dengan cara produksi yang dominan. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa setiap kelas sosial dari basis produksi ekonomi menciptakan sendiri intelektual mereka yang mengorganisir homogenitas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Kemudian entrepreneur kapitalis menciptakan sendiri teknisi industrial, ekonomi politik, para agen kebudayaan baru dan pembentuk hukum baru.

Fungsi mendesak yang dijalankan oleh intelektual organik kelas kapitalis adalah bertindak sebagai deputi atau agen kelas dalam mengorganisir hegemoni dalam masyarakat sipil dan dominasinya melalui aparat negara.³⁸

Intelektual seperti teknisi, dan sebagainya tersebut, hanya bertindak dalam pelayanan terhadap satu atau lebih kapitalis dalam ruang produktif. Aktivitas mereka tetap dalam dunia kebutuhan korporasi-ekonomi dari kelas kapitalis. Kelas ini pada saat yang sama harus memilih intelektual lain dengan

³⁷ *ibid*, hal 5

³⁸ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 145

Kapasitas menjadi organiser masyarakat secara umum, termasuk segala pelayanan organisasinya yang kompleks, organisme negara, karena kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang menyenangkan untuk perluasan kelas mereka sendiri; atau sedikitnya mereka punya kapasitas untuk memilih deputinya (pegawai khusus) yang dipercayakan kegiatan mengorganisir sistem umum dari hubungan luar pada bisnis itu sendiri. (SPN 5-6)

Dengan demikian unsur-unsur yang menentukan apakah kelompok tertentu sebagai intelektual organik atau bukan adalah, pertama, mereka menjadi suatu kategori pada waktu sejarah yang sama sebagai suatu kelas baru yang menciptakan dan mengembangkan dirinya. Kedua, intelektual ini memberikan kelas suatu homogenitas dan suatu kesadaran akan fungsinya sendiri bukan cuma pada ekonomi namun juga pada lapangan sosial dan politik.³⁹

Para intelektual tersebut dapat disebut intelektual organik jika mereka mampu menjalankan fungsi intelektualnya dalam mengorganisir kelas lain untuk mempertahankan dominasi kelas yang berkuasa atau menciptakan konsensus dari kelas-kelas lain.

Tipe intelektual organik mengakui hubungan mereka dengan kelompok sosial tertentu dan memberikannya homogenitas serta kesadaran tentang fungsinya, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial politik. Kelompok ini menembus sampai ke massa. Memberikan mereka sebuah pandangan dunia baru dan menciptakan kesatuan antara bagian bawah dan atas. Hal ini tidak berarti kebudayaan baru muncul begitu saja dari produksi, melainkan harus menentang *common sense* dari cara-cara massa berpikir yang tradisional.

Gramsci berkata bahwa intelektual organik adalah para organisator hegemoni kelas, dan hegemoni itu diperuntukkan bagi kelas pekerja.⁴⁰ Pada pembahasan tentang strategi perang posisi yang dikemukakan Gramsci, mencakup tindakan melakukan perubahan-perubahan besar

³⁹ Gramsci, dikutip dalam Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset: 1999), hal 161

⁴⁰ Ibid, hal 161

dalam masyarakat sipil. Proses ini tidak hanya menuntut perjuangan politik dan ekonomi untuk menciptakan jaringan aliansi, anamun juga perjuangan ideologis untuk mengubah kesadaran rakyat dengan tujuan membangun pandangan baru.

Dalam hal ini korporasi multinasional memiliki agennya sendiri yang berfungsi sebagai intelektual organik yang mengorganisir hegemoni kepada masyarakat Indonesia. Para supervisor buruh pabrik yang dapat mengkoordinir para buruh dan mengontrol kepentingannya, kemudian menanamkan nilai-nilai kepada para buruh yang menguntungkan bagi kepentingan produksi perusahaan. Peran intelektual bagi konsumen MNC dapat dijalankan oleh bagian persuatif untuk menyebarkan budaya-budaya baru untuk membentuk suatu nilai yang menjadikan konsumen tertarik pada produk MNC. Agen-agen intelektual MNC juga membangun suatu opini positif dari masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya dari dukungan masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari beberapa foundation dan program yang diklaim MNC sebagai program pertanggungjawaban sosial dari perusahaan terhadap masyarakat di wilayah sekitar tempat beroperasinya MNC. Sebagai contoh dapat kita lihat program yang dilaksanakan oleh Freeport, di mana dalam salah satu program beasiswa Fullbright, Freeport menyediakan beasiswa studi ke Amerika hanya khusus untuk warga Papua.

E. Hipotesis:

Korporasi Multinasional berhasil menjalankan ekspansinya di Indonesia tanpa perlawanan dari pihak yang dieksploitasinya dengan menerapkan pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci, yaitu dengan cara:

1. Menanamkan nilai-nilai positif korporasi kepada masyarakat Indonesia melalui agen-agen MNCs untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat dan kelas sosial lain.

2. Bekerjasama dengan negara (pemerintah) melalui kekuasaan pemerintah mengambil kebijakan dan kekuasaan koersif untuk mempertahankan dukungan rakyat Indonesia terhadap kegiatan operasi MNCs.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberhasilan ekspansi MNCs di negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia, baik keberhasilan dalam bidang ekonomi maupun politik.
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap MNCs yang pada dasarnya eksploitatif.
3. Untuk membuktikan bahwa MNCs menerapkan pemikiran hegemoni dari Antonio Gramsci dalam ekspansinya di Indonesia.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penulisan skripsi ini akan menggunakan dasar metode studi kepustakaan (library research) serta pengambilan data primer melalui wawancara. Berbagai data dari buku, surat kabar, jurnal, dokumen dan sumber internet dijadikan sebagai referensi untuk library research. Sedangkan untuk data primer akan diadakan wawancara sebagai pendukung data yang didapatkan dari studi kepustakaan.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi dibatasi pada kegiatan ekspansi korporasi multinasional di Indonesia sejak dimulainya orde baru hingga tahun 2010, sebab era orde baru merupakan titik penting perkembangan MNCs di dunia. Sekitar tahun 1960-an, perusahaan-

perusahaan Amerika mulai berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi ke negara lain, serta memperoleh keuntungan di luar negeri yang lebih banyak daripada di dalam negeri. Selain itu, pada masa itu, juga merupakan masa transisi yang penting di Indonesia, di mana keterlibatan pihak asing dalam ekonomi, termasuk korporasi multinasional mulai dibuka selebar-lebarnya, dan berkaitan erat dengan sejarah masuk dan berkembangnya korporasi multinasional di Indonesia. Penulis mengambil tiga korporasi multinasional di Indonesia sebagai objek penelitian, yaitu Freeport, GAP dan KFC.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, sejarah dan perkembangan MNCs di dunia dan negara dunia ketiga, perkembangan MNCs di Indonesia, analisa hegemoni MNCs, dan kesimpulan.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Hal tersebut dikarenakan yang tertulis dalam bab ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Bab dua yaitu sejarah dan perkembangan MNCs di dunia dan di negara dunia ketiga. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah dan definisi dari MNC. Dilanjutkan dengan bab tiga yang membahas perkembangan MNCs di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas mengenai awal mula dibukanya investasi dan perusahaan asing di Indonesia, serta tentang kondisi MNCs di Indonesia saat ini. Sebab perkembangan keberhasilan MNC di Indonesia merupakan objek utama yang akan diteliti, sehingga perlu dijelaskan secara terperinci, serta sejarahnya untuk

memberikan gambaran kepada pembaca tentang penjelasan MNC sebagai objek utama yang diteliti.

Bab empat merupakan analisa hegemoni MNCs di Indonesia dan negara dunia ketiga dengan teori yang digunakan. Dalam bab ini akan dilakukan analisa mengenai keberhasilan MNC dengan cara dominasi terhadap masyarakat Indonesia menggunakan teori pemikiran yang dipaparkan oleh Antonio Gramsci. Pembahasan analisa dalam bab ini sebab yang tertulis dalam bab IV merupakan upaya memperoleh jawaban dari hipotesa yang dipaparkan pada awal bab penulisan skripsi ini. Kemudian hasil analisa yang diperoleh akan dirangkum dalam bab ke lima yang berisi kesimpulan dari penelitian ini.